

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu teori klasik yang mengelola perubahan adalah teori Kurt Lewin, yang mana disini meniskripsikan tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan terencana perbaikan secara terus menerus membantu dalam keberlanjutan jangka panjang dalam suatu manajemen organisasi. Perubahan terencana diklasifikasikan sebagai saha yang disengaja dilakukan dengan dengan perhitungan yang matang serta bersifat kolaboratif untuk menghasilkan perbaikan sistem dengan bantuan agen perubahan.<sup>9</sup>

Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahapan yaitu mencairkan (*Unfreeze*), Perubahan (*Movement*), dan Membekukan Kembali (*Refreeze*).menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo disini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual dan kelompok serta dilakukan 3 metode diantaranya:

1. Meningkatkan faktor-faktor penggerak yang bisa menjauhkan individu atau kelompok dari situasi status quo yang berlaku saat ini.

---

<sup>9</sup> Rouseel, L. Swansburg, R. C. & Swansburg, R. J. (Eds). *Model Lewin Dalam Meanajemen Perubahan : Teori Klasik Menghadapi Dirupsi Dalam Lingkungan Bisnis*, Jurnal MBIA, 19(2), Agustus 2020, Hlm 143, <http://doi.org/10.33557/mbia.v19i2.989> , diakses pada tanggal 06 Juli 2021 pukul 06,30

2. Mengurangi kekuatan-kekuatan negatif yang dapat menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat ini.
3. Menemukan kombinasi dari dua metode diatas.

Dalam kondisi ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses mencairkan, termasuk didalamnya memotivasi peserta perubahan dengan menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan dan mengenali kebutuhan akan perubahan serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya.<sup>10</sup>

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.<sup>11</sup> Menurut Toto Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.<sup>12</sup>

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga

---

<sup>10</sup> Ibid. Hal 144

<sup>11</sup> Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.3

<sup>12</sup> Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.61

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.<sup>13</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal.182

<sup>14</sup> Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, ( Kendari : Unhalu Press, 2011), hal.31-32

Dalam proses pemberdayaan salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu :

1. Pemungkinan Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.
2. Penguatan Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.
3. Perlindungan Yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4. Penyokongan Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.
5. Pemeliharaan Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan,

tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

#### **B. Teori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional,

---

<sup>15</sup> UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.<sup>16</sup> BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>17</sup> BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam membantu perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup dan digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi.<sup>18</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal.35

<sup>18</sup> Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai. Repository Univesitas Sumatera Utara. Hal.25

terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.<sup>19</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan

---

<sup>19</sup> Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pratusas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal 4



pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.<sup>20</sup> Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus

---

<sup>20</sup> M.Atzil.M.A, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2017. Hal.54

menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes.<sup>43</sup> Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Buku Panduan Pendidikan dan Pengelolaan BUMDes, 2007, Hal 13.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

### **C. Teori pertumbuhan Ekonomi**

Dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik

melalui upaya sendiri.<sup>22</sup> Aktifitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersediannya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil.

Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.<sup>23</sup> Menurut Baonewidjojo yang dikutip oleh Ayub, menyimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu, 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 2) meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat, 3) meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, 4) menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, 5) membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya, serta 6) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>M. Atsil.M.A., "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran", *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2017, hal.45

<sup>23</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, ( Jakarta :Kencana, 2006), hal.72

<sup>24</sup> Ayub M. Padangaran, *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011) hal.31

Menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>25</sup>

Menurut Fellmann yang dikutip oleh Andrianisari pengertian pengembangan adalah: 1) Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang. 2) Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi. Pembangunan atau pengembangan pedesaan (*rural development*), menurut Mosher, dapat mempunyai tujuan: 1) Pertumbuhan sector pertanian, 2) Integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negara ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, 3) Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu di bagi-bagi kepada seluruh penduduk.<sup>26</sup>

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

---

<sup>25</sup> Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta : Cides, 1996), Hal 142

<sup>26</sup>Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Repository Universitas Sumatera Utara*, 2017, hal.16

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, antara lain :

1. *Direct Contact* (bertatap muka langsung dengan sasaran ) Metode ini adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalau mereka sendiri yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

2. *Demonstrasi Hasil* yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara lama yang mereka kuasai.

3. *Demonstrasi proses* adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.

4. Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>27</sup>

Selain strategi diatas, ada strategi pendekatan konservatif yang berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam

---

<sup>27</sup> Supriyati Istiqamah, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008), hal.45

parameter konvensional. Adapun yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi konservatif adalah melalui:

Pertama menarik industri, pendekatan ini berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam ekonomi *mainstream* dengan cara menghimpun inisiatif. Pendekatan ini mencoba menarik industri baru ke wilayah lokal dengan memberikan lingkungan bagus untuk berinvestasi.

Kedua memulai industri lokal, pendekatan ini melibatkan pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal, bakat, minat dan keahlian serta penafsiran keuntungan-keuntungan alam dari lokalitas tertentu dan kemudian memutuskan apa jenis industri baru yang akan berhasil.

Ketiga pariwisata, mempromosikan pariwisata menjadi alternatif yang menarik, pariwisata akan menjadi sumber daya yang potensial yang dapat mendatangkan penghasilan, dan juga sebagai industri bersih yang tidak menimbulkan polusi serta dapat mendukung terbukanya tenaga kerja.<sup>28</sup>

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan jalan memberikan

---

<sup>28</sup> Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal.424-426



pelatihan sebagai bekal untuk masyarakat memasuki dunia usaha. Adapun langkah-langkah tersebut adalah :

1. Pelatihan usaha, melalui pelatihan masyarakat diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam seluk beluk yang ada di dalamnya dengan tujuan meningkatkan produktifitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk serta perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisien usaha dengan pengembangan jejaringan kemitraan.
2. Pemagangan, dalam bidang usaha diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empiric.
3. Penyusunan proposal, sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal dapat memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.
4. Permodalan, yang merupakan salah satu factor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
5. Jaringan bisnis, sebagai upaya konsistenitas ,keberlanjutan usaha yang akan dilaksanakan.<sup>29</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Melalui

---

<sup>29</sup> Toto Mardikanto, *Pemberdayaan masyarakat* (Surakarta: UNS Pres, 2010)hal .225

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”.

1. Penelitian Dewi Kirowati dan Lutfiah Dwi S. bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan desa Temboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Penelitian tersebut menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu manfaat pengembangan BUMDes dapat dirasakan warga desa Temboro dengan terciptanya usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes yang meliputi kepercayaan, jaringan yang berbentuk tanggung renteng yang merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama dan norma yang tercermin saling bantu membantu dalam pengelolaan BUMDes desa Temboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan. Perbedaan dengan penelitian ini tidak ada objek pemberdayaan masyarakat dan meneliti peran modal sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sama dengan penelitian saya karena objek penelitian berupa pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes.<sup>30</sup>
2. Penelitian Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari bertujuan untuk mengetahui progam pemerintah yaitu BUMDes yang harus diberdayakan

---

<sup>30</sup> Dewi Kirowati dan Lufiah Dwi S.”Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”,*Jurnal Jurusan Akuntansi dan Sistem Informasi Politeknik Negeri Madiun*, vol.1,2018, diakses pada tanggal 02 Juli 2018

dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta pengawasan. Perbedaan dengan penelitian ini objek penelitian berupa peran pemerintah dalam mengelola BUMDes. Persamaan dengan penelitian ini meneliti tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.<sup>31</sup>

3. Penelitian M.Atzil.M.A bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pasewaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui di buka beberapa unit usaha yang merupakan kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit usaha tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Perbedaan penelitian ini tidak meneliti strategi pemberdayaan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini pengembangan ekonomi melalui BUMDes dan menggunakan metode

---

<sup>31</sup>Valentine Queen Chintary dan Asih Widi Lestari ,“Peran Pemerintah Desa Dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa”,*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*, Vol. 05 No.02,2016, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018

penelitian kualitatif. Penelitian ini sama dengan penelitian saya tentang pengembangan ekonomi<sup>32</sup>

4. Penelitian yang ditulis oleh Andriani Sari bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pengaruh BUMDes terhadap pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Persamaan dengan penelitian ini meneliti tentang pengembangan ekonomi melalui BUMDes dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian saya karena lebih fokus ke pendapat masyarakat dan penyerapan kerja.<sup>33</sup>
5. Penelitian yang ditulis oleh Dodi Yudiardi bertujuan untuk mengetahui sektor perekonomian Kabupaten Garut didominasi oleh sektor pertanian yang berbasis di perdesaan namun pertumbuhannya sangat lambat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil dari penelitian tersebut yaitu berbagai program pemerintah untuk pengembangan ekonomi

---

<sup>32</sup>M. Atsil.M.A., "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran", *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2017

<sup>33</sup> Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagei", *Repository Universitas Sumatera Utara*, 2017, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

antara lain Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta program UPK-PKP-PKK sudah digulirkan untuk memperkuat perekonomian di Desa namun hasilnya belum memuaskan. Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah. Perumusan strategi pengembangan BUMDes dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal BUMDes. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki BUMDes. Pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pengembangan lain merupakan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan BUMDes. Urutan strategi pengembangan manajemen BUMDes selanjutnya adalah diversifikasi produk, penetrasi pasar, pengembangan produk BUMDes, dan pelatihan karyawan. Perbedaan dengan penelitian ini tidak meneliti strategi pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian analisis SWOT. Persamaan dengan dengan penelitian ini meneliti strategi dalam pengembangan BUMDes. Penelitian ini sama dengan penelitian saya karena mengarah pengembangan ekonomi.<sup>34</sup>

6. Penelitian yang ditulis Ratna Azis Prasetyo bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa

---

<sup>34</sup> Dodi Yudiardi, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan Kabupaten Garut", *Jurnal Jurusan Administrasi Publik Universitas Garut*, 2015, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes yang secara garis besar tujuan dari penelitian adalah : untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat Desa dalam pemanfaatan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes, mengetahui kontribusi BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih rendah, hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat tentang program BUMDes. Keberadaan BUMDes masih belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Peneliti ini berbeda dengan penelitian saya, karena lebih fokus ke pemanfaatan dana Desa.<sup>35</sup>

7. Penelitian irkham Abdul Rokhim dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan tentang pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa meliputi sektor pertanian, wisata, dan UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan *filed research* melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>35</sup>Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Jurusan Sosiologi Universitas Airlangga*, Vol. XI No. 1, 2016, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori pembangunan desa, landasan teori tentang ekonomi kerakyatan, dan landasan teori tentang BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksanaannya. Peneliti ini sama dengan penelitian saya yang berfokus pada pengembangan ekonomi.<sup>36</sup>

8. Jurnal Ilmiah Akutansi Akutansi Dan Humanika Volume 8, nomor 1, tahun 2018 yang disusun oleh Hillalliatun Febryani,dkk berjudul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Pengeolaan Badan Usaha Milik Desa pada Desa Abiantuwung dan bagaimana perkembangan dan peningkatan ekonominya. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dan penelitian ini sama dengan penelitian saya tentang pengembangan ekonomi dalam BUMDes itu sendiri.<sup>37</sup>

Penelitian ini memiliki Novelty atau pembaharuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan penelitian BUMDes Srikandi berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi, karena secara garis besar BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat terutama dari Sektor Perekonomian. Pemberdayaan disini memberikan

---

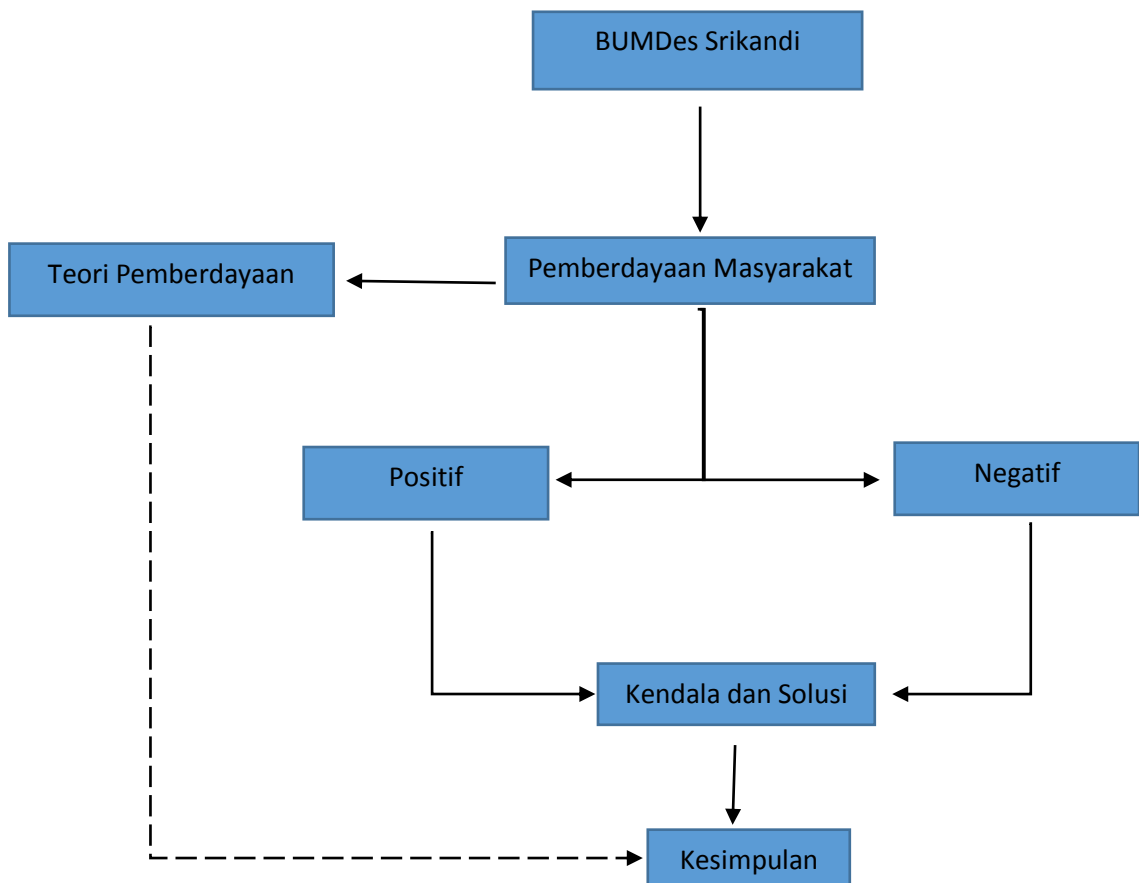
<sup>36</sup> Irkham Abdur Rokhim, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo.

<sup>37</sup>HillalliatunFebryani,Dkk,*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*, <http://dx.doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865> diakses pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 18.30.

pengaruh besar bagi masyarakat dengan adanya perubahan terencana, perbaikan secara terus-menerus, membantu dalam keberlanjutan jangka panjang dan memberikan suasana positif bagi warga dalam mengeksplorasi potensinya.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka teori adalah serangkaian konsep hubungan yang dirumuskan oleh peneliti dengan memeriksa teori yang ada.



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa BUMDes Srikandi mengadakan sosialisasi yaitu pemberdayaan masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi dengan Teori Pemberdayaan bahwa mengarahkan



masyarakat pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan respon positif, yang mana banyak yang antusias dan dukungan dalam adanya pemberdayaan, adanya unit usaha baru, pelatihan kewirausahaan, penggalan potensi, sebaliknya respon negatif dari masyarakat adanya penolakan, kurang sadarnya masyarakat tentang pemberdayaan, dan semua itu adanya hambatan diantaranya minimnya dana, masih sedikitnya gudang dan tempat usaha, sempitnya lahan pasar, dll. Dengan perbaikan adanya perubahan diantaranya memberikan lapangan kerja pada masyarakat, menjadi Desa yang mandiri, membantu pendirian usaha baru. Dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari pemberdayaan yang dilakukan BUMDes Srikandi sudah sesuai dengan teori apa belum.